

ABSTRAK

Pertambangan merupakan usaha untuk menggali berbagai potensi-potensi yang terkandung dalam perut bumi. Permasalahan pertambangan tidak hanya timbul dari adanya kegiatan pertambangan yang bersifat resmi, tetapi juga menyentuh kepada kegiatan pertambangan yang bersifat tidak resmi (tidak memiliki izin/illegal) atau biasa disebut Illegal Mining. Maka penelitian ini bertujuan untuk mengkaji faktor-faktor apa sajakah yang menyebabkan terjadinya usaha pertambangan tanpa izin, dan bagaimana penerapan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana pertambangan tanpa izin usaha, serta bagaimana upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah agar dapat meminimalisir tindak pidana pertambangan tanpa izin usaha tersebut.

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penulisan ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, sedangkan spesifikasi penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah termasuk deskriptif analitis. Data yang diperoleh dari penelitian dikumpulkan dan dilakukan analisis dengan jalan menafsirkan dan mengkonstruksikan pernyataan yang terdapat dalam dokumen dan perundang-undangan. Dengan proses penelitian menggunakan kajian analisis secara yuridis kualitatif dengan cara menggabungkan data hasil studi literatur.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi Pidana diatur dalam Pasal 158 dan 160 mengenai sanksi administratif dan sanksi Pidana kurungan, sedangkan upaya yang dapat dilakukan baik oleh pemerintah dan masyarakat itu sendiri untuk menanggulangi pertambangan tanpa izin usaha ialah diantaranya, Peran Pemerintah dengan melakukan upaya preventif dan represif. Upaya Preventif yang dilakukan ; a) Melakukan sosialisasi mengenai Undang-Undang Nomor: 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, b) Pemasangan spanduk/pamflet tiap kecamatan mengenai bahaya kegiatan pertambangan tanpa izin/illegal mining, c) Melakukan Bimbingan dan Pengawasan Terhadap Seluruh Kegiatan Pertambangan, d) Memberikan Penyuluhan kepada Masyarakat, sedangkan Usaha Represif ; Menindak tegas pelaku kejahatan pertambangan tanpa izin dan memproses sesuai dengan hukum yang berlaku serta menyita alat yang digunakan dalam melakukan kegiatan pertambangan tanpa izin, baik pompa maupun alat berat seperti excavator dan loader, selain itu dibutuhkan juga sikap keterbukaan masyarakat, serta ketersediaan lapangan pekerjaan.

Kata kunci : tindak pidana pertambangan, hukum pidana

ABSTRACT

Mining is an attempt to explore the potential contained in the bowels of the earth. Mining problems not only arise from the existence of mining activities, but also informal mining activity or commonly called Illegal Mining. So this study aims to examine what factors lead to the occurrence of mining business without a permit (illegal), and how the sanctions for illegal mining, and how government effort in order to minimize illegal mining.

The approach method used in this paper uses a normative juridical approach, while the research specifications in writing this thesis are descriptive analytical. The data obtained from the study were collected and analyzed by interpreting and constructing the statement contained in the documents and legislation. The research process uses qualitative juridical analysis studies by combining data from the results of literature studies.

The results showed criminal sanctions are regulated in Articles 158 and 160 regarding administrative sanctions and criminal confinement sanctions. From the two examples of cases of Illegal Mining without a Business License, it can be illustrated that mining without a business permit is very detrimental to the environment, society and government. Government effort in order to minimize illegal mining and the community itself to tackle illegal mining are the role of the Government by carrying out preventive and repressive efforts.

Keywords : illegal mining, criminal law